

MAKNA SAPATHA PADA PRASASTI SUKAWANA *The Meaning of Sapatha in Sukawana Inscription*

I Wayan Sumerata

Balai Arkeologi Bali

Jl. Raya Sesetan No. 80, Denpasar 80223

Email: yan_sumerata@yahoo.com

Naskah diterima: 18-01-2017; direvisi: 09-02-2017; disetujui: 31-03-2017

Abstract

Weak social control in the past caused the king issued sapatha which listed in an inscription. This research aims to reveal the meaning of sapatha and the elements which influence it. Therefore, understanding of sapatha will be known overall and understood by people especially those who inherited it. Data were collected through observation, direct reading, and literature study related to inscription researches in Kintamani area. The data were analyzed based on inscription analysis technic with some steps namely source identification through transliteration and translation. Data interpretation was done by generally describing groups of inscription which contain sapatha and presented descriptive-qualitatively. Groups of Sukawana Inscription which contain sapatha are inscriptions of Sukawana AII which was issued by King Anak Wungsu dated from 976 Saka or 1054 A.D and Sukawana D which was issued by King Patih Kebo Parud. Sapatha is a social control which contains several meanings namely power, religion, and law. Those meanings show the greatness of the power domination in any interest.

Keywords: sapatha, meaning, social control.

Abstrak

Kontrol sosial yang sangat lemah pada masa lalu menyebabkan raja mengeluarkan sapatha yang dicantumkan dalam sebuah prasasti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam sapatha dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Dengan demikian pemahaman terhadap sapatha akan diketahui secara menyeluruh dan dapat memberikan pengertian terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang mewarisinya. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan pembacaan langsung, serta studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian prasasti di wilayah Kintamani. Tahap analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis prasasti dengan tahapan seperti identifikasi sumber melalui alih aksara dan alih bahasa. Tahap penafsiran data dilakukan dengan memaparkan isi secara umum kelompok Prasasti yang memuat tentang sapatha, dan disajikan secara deskriptif-kualitatif. Kelompok Prasasti Sukawana yang memuat tentang sapatha adalah prasasti Sukawana AII yang dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu berangka tahun 976 Saka atau 1054 dan prasasti Sukawana D yang dikeluarkan oleh Raja Patih Kebo Parud. Sapatha merupakan sebuah kontrol sosial yang mengandung beberapa makna seperti makna kekuasaan, religi, dan hukum. Semua makna tersebut menunjukkan besarnya dominasi kekuasaan dalam berbagai kepentingan.

Kata kunci: sapatha, makna, kontrol sosial.

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah Bali yang sangat panjang menyisakan berbagai tinggalan arkeologi, baik berupa artefak, ekofak, dan fitur. Salah satu artefak yang menarik untuk

dikaji adalah prasasti, karena merupakan satu-satunya sumber tertulis yang dapat memberikan informasi autentik tentang masa lalu. Riwayat penelitian prasasti di Bali dirintis oleh H.N. van der Tuuk dan J.L.A. Brandes. Kemudian

disusul oleh peneliti-peneliti, seperti W.F. Stutterheim, P.V. van Stein Callenfels, Roelof Goris, L. Ch. Damais, Ketut Ginarsa, Sukarto K. Atmodjo, Putu Budiastara, dan I Gde Semadi Astra (Atmodjo 1977, 33). Selain Sumatera dan Jawa, Bali juga memiliki tinggalan berupa prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja yang pernah memerintah di Bali. Menurut Bakker prasasti merupakan maklumat yang dipahatkan pada batu, daun *tal* (rontal atau lontar), kulit kayu, bambu, daluang, dan bahan lainnya yang berisikan suatu anugerah atau hak istimewa, dan dikeluarkan oleh raja atau pejabat kerajaan sejak abad ke-5 Masehi. Prasasti merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum serta dalam penetapannya diresmikan dengan suatu upacara (Bakker 1972, 4-10; Boechari 1977, 2). Prasasti Jawa dan Bali Kuno pada umumnya memuat tentang upacara, peraturan desa, batas-batas desa, pajak, hak dan kewajiban, perdagangan, larangan menebang pohon tertentu, *sapatha* atau kutukan, dan lain sebagainya (Sunarya et al. 2015, 3).

Prasasti Sukawana merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang dapat dijumpai pada masa kini. Penelitian tentang Prasasti Sukawana pernah dilakukan oleh R. Goris yang tertuang pada buku Prasasti Bali I berupa alih aksaranya saja, kemudian alih bahasa dalam bahasa Belanda dan ringkasan termuat dalam buku Prasasti Bali II. Pada masa berikutnya Wirtawan mahasiswa Jurusan Arkeologi Universitas Udayana dalam skripsinya yang berjudul “Unsur-Unsur Birokrasi Bali Kuno pada Prasasti Sukawana D.” Dalam skripsinya Wirtawan memaparkan tentang birokrasi pemerintahan dan nama-nama pejabat yang duduk dalam pemerintahan. Adapun nama-nama pejabat yang disebutkan dalam prasasti ini adalah raja, senapati, sang ariya, samgat, dan kabayan (Wirtawan 2013, 142). Berkaitan dengan kekuasaan pada masa Bali Kuno, Astawa menganalisis dalam artikelnya yang berjudul *Stratifikasi Kekuasaan pada Masa Pemerintahan Raja Marakata Abad ke-11*

Masehi. Dalam penelitian tersebut, stratifikasi sosial yang ada pada masa itu dianggap menjadi jurang pemisah antara raja dan rakyatnya (Astawa 1996, 34). Selain unsur birokrasi dan kekuasaan, Prasasti Sukawana masih memerlukan pengkajian lebih mendalam dengan pendekatan yang lebih spesifik, khususnya yang berkaitan dengan *sapatha*. Tafsiran tentang *sapatha* selama ini hanya sebatas pada artinya saja yaitu kutukan, padahal banyak yang perlu diketahui mengapa raja sampai mengeluarkan *sapatha*.

Sapatha berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti kutuk, sumpah atau janji, dan dapat juga diartikan dengan pernyataan sumpah (Zoetmulder 1995, 1032). *Sapatha* dalam prasasti dapat memberikan jaminan kepada institusi politik dan agama, karena kontrol sosial yang masih sangat lemah, sehingga *sapatha* dianggap mampu meminimalisir pelanggaran (Maulana 1993, 127). Kontrol sosial menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mengendalikan kasus-kasus sosial dalam masyarakat pada saat itu, karena belum adanya hukuman yang jelas bagi pelanggarnya. *Sapatha* merupakan legitimasi kekuasaan yang dijadikan alat untuk menjalankan kekuasaan dengan cara memberikan hukuman kepada masyarakat yang melanggar kebijakan dan ketentuan raja yang tertuang dalam prasasti. Dalam hal ini raja sangat bersandar pada kekuasaan ilahi (Astra 1997, 204).

Beberapa *sapatha* secara rinci menyebutkan kesengsaraan yang akan dialami oleh para pelanggarnya, bukan saja kehidupan di dunia, tetapi sampai kehidupan di akhirat, bahkan sampai istri dan keturunannya (Darmosoetopo 1995, 19-20). Lebih lanjut dijelaskan oleh Darmosoetopo bila dalam prasasti terdapat *sapatha* dengan jelas diketahui sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya dan jenis-jenis perbuatan yang terkena sanksi. Selain itu, disebutkan juga besarnya denda apabila sanksi diwujudkan bukan secara fisik (Darmosoetopo 1995, 17). Beberapa hal dalam *sapatha* secara tersurat dengan jelas diketahui,

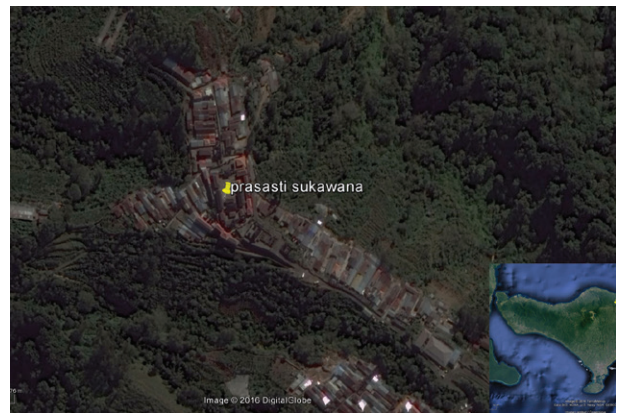
seperti jenis-jenis kutukan dan sanksi bagi para pelanggarnya, akan tetapi masih perlu diketahui tentang makna-makna lain yang terkandung di dalamnya, sehingga diperlukan penelitian khusus yang mengupas tentang makna dalam *sapatha*, sehingga secara menyeluruh dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas tentang makna apakah yang terkandung dalam *sapatha* pada Prasasti Sukawana. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam *sapatha* dan unsur-unsur yang mempengaruhinya.

Permasalahan di atas akan dibahas dengan metode dekonstruksi yang menyatakan, bahwa bentuk kritik berdasarkan pembacaan yang sangat hati-hati dan mengungkap makna di balik teks. Artinya teks tidak dipandang dari sisi luarnya saja, melainkan mengungkap makna tersembunyi yang mungkin terbalik dengan yang tertera dalam teks (Lubis 2014, 41). Hal ini senada dengan pendapat Peter Barry (dalam Lubis 2014, 42) bahwa dekonstruksi adalah cara membaca teks di luar kebiasaan karena teks tidak dapat bicara dan hanya dapat ditafsirkan. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan teori hermeneutika yang memandang makna tekstual diwujudkan oleh pembaca aktual dalam sebuah proses penafsiran (Barker 2014, 121). Interpretasi adalah mencakup pemahaman. Untuk dapat membuat interpretasi terlebih dahulu mengerti atau memahami. Pemahaman dapat diperoleh bila subyek memiliki kesadaran terhadap obyek. Kegiatan memaknai sesuatu pada dasarnya adalah melakukan interpretasi (Muzir 2008, 98). Kedua teori ini akan digunakan untuk menafsirkan teks *sapatha* yang terdapat dalam Prasasti Sukawana, dengan penafsiran ini akan ditemukan makna-makna yang terkandung dalam teks tersebut. Prasasti dikeluarkan oleh raja yang memiliki kekuasaan pada masa itu, dalam penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori kekuasaan yang dikeluarkan oleh Foucault yang menyebutkan kekuasaan

dikendalikan oleh wacana dan bagaimana wacana itu selalu berakar dalam kekuasaan dan kekuasaan bersumber dari pengetahuan yang secara langsung saling mempengaruhi (Foucault dalam Lubis 2014, 83).

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pura Bale Agung Sukawana Kintamani pada tahun 2013 (gambar 1), secara umum, metode yang digunakan dalam penelitian Prasasti Sukawana dilakukan melalui tiga tahap penelitian, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penafsiran data. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan pembacaan langsung, serta studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian prasasti di wilayah Kintamani. Tahap analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis prasasti dengan tahapan seperti identifikasi sumber melalui alih aksara dan alih bahasa. Tahap penafsiran data dilakukan dengan memaparkan isi secara umum kelompok Prasasti yang memuat tentang *sapatha*, dan disajikan secara deskriptif-kualitatif.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian.
(Sumber: Diolah dari www.google.com/earth)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sapatha dalam Prasasti Sukawana

Prasasti Sukawana yang terdiri atas 21 lembar terbagi dalam lima kelompok, yaitu prasasti Sukawana AI dan AII merupakan satu kesatuan prasasti yang berjumlah lima lembar. Prasasti Sukawana B berjumlah delapan

lembar, prasasti Sukawana C berjumlah satu lembar, dan prasasti Sukawana D berjumlah tujuh lembar (gambar 2). Dari jumlah kelompok prasasti tersebut yang dijadikan topik bahasan dalam penelitian ini adalah prasasti Sukawana AII dan prasasti Sukawana D.



Gambar 2. Prasasti Sukawana D.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

Pada kelompok prasasti Sukawana AII dikeluarkan oleh Raja Anak Wungsu berangka tahun 976 Saka atau 1054 Masehi pada beberapa bagian memuat tentang *sapatha* atau kutukan. Alasan dikeluarkannya prasasti ini adalah permohonan langsung dari masyarakat untuk menggantikan prasasti sebelumnya yang berupa lontar telah rusak, sehingga masyarakat memohon kepada raja untuk menggantinya ke dalam tembaga. Dalam prasasti ini termuat tentang aturan-aturan tentang perdagangan, khususnya pembelian dari luar Desa Cintamani (Suarbhawa et al. 2013, 32). Pada bagian akhir dicantumkan kutukan atau *sapatha* bagi siapa yang melanggar isi prasasti. Untuk memperkuat

kutukan, di dalamnya dicantumkan permohonan kepada dewa-dewa penguasa penjuru mata angin, seperti Satya, Dharma, Kala, Mertiyu, Kroda, Kama, Iswara, Harih, dan Yajamanakasa Dharma (Suarbhawa et al. 2013, 21). Adapun kutipan isi prasasti Sukawana AII, lembar ke IVb baris ke 3, 4, 5, dan lembar Va yang menyebutkan kutukan seperti berikut.

“IVb. 3. na yawat umarukta sarasa nikang prasasti anugraha paduka haji i rikanang karaman i cintamani sapasuk thani at upadrawa bhatarā, salwiring jagat upadrawa bhuktinya

IVb. 4. saputning phira, sajiwakala ateher kapataka hitipan ing tamra gomuka ping sataharsa dasa manu ta lawasanyan pangjanma, taktak, wdit hulr, latay, lintah,

IVb. 5. tmahanya, ta molaha ri pa (nga) sthanany, kuncangen ni maharoga, kadi lawa(s) sanghayang candraditya sumuluhing andabhuwana, samangkana lawasannyan hidepang lara bhataka sang

Va. 1. sara neher apapabhrasta sakula sabhanda, luputning klesa, tan tmwang sarbopaya, tka ring ihatra paratra ateher snaksyaken di tanda rakreyan ri pakirakiran i jro makabehan...”
(Suarbhawa et al. 2013, 7).

Terjemahan dari kutipan prasasti tersebut adalah:

IVb. 3. ‘apabila ada orang yang berani merusak atau menentang isi prasasti anugerah paduka raja kepada penduduk Cintamani sewilayah desa, dikutuklah oleh *bhatarā*, berbagai macam kutukan yang berat’,

IVb. 4. ‘ia dapatkan selama hidupnya, jika sudah mati disiksa di dasar kawah Candra Gomuka sampai 10 ribu tahun, dan jika dia menjelma ke dunia maka akan menjadi tak-tak, wdit, ulat, dan lintah’,

IVb. 5. ‘seperti itulah yang akan terjadi, dan selalu ditimpa bencana besar atau kesusahan, seperti lamanya bulan dan matahari mengelilingi bumi, demikian lamanya mendapatkan kesusahan’,

Va. 1. 'kesengsaraan, kemudian mati sengsara keluarganya, dipenuhi dengan kotor, tidak akan menemukan daya upaya sampai ajalnya menjemput, disaksikan oleh para pejabat dalam majelis permusyawaratan' (Suarbhawa et al. 2013, 7).

Penyebutan *sapatha* juga terdapat pada kelompok prasasti Sukawana D. Prasasti Sukawana D dikeluarkan oleh Raja Patih Kebo Parut pada tahun 1222 Saka atau 1300 Masehi (Suarbhawa et al. 2013, 33). Penyebutan *sapatha* dalam prasasti Sukawana D terdapat pada lembar VIIa, baris 1 sampai 5 dengan kutipan sebagai berikut.

"VIIa. 1. ...asiñ mañāmbaḥ sikṣan sang
VIIa. 2. hyang rajā praśaṣṭī, tulāḥ manuḥ, kṇa jāgat upadrawa, kadi matenī brahmaṇa
VIIa. 3. satus dwalapan, lēmbū skandran kadyaṅāning sang hyang candrā ditya, sumulu-
VIIa. 4. hē triṇi loka jāgat kāraṇā, mañkāna lawasaning pāpanya manusa tan parup
VIIa. 5. manusa, yan māñambāḥ satyan sang hyang tāmbra..." (Suarbhawa et al. 2013, 19).

Terjemahan dari kutipan prasasti Sukawana D tersebut adalah:

VIIa. 1. '...barang siapa yang berani melanggar isi dari Sang',
VIIa. 2. 'Hyang Raja Prasasti, terkutuklah seketurunannya, terkena bencana untuk wilayahnya, seperti membunuh Brahmana',
VIIa. 3. 'seratus dua puluh delapan, lembu sekandang. Bagaikan Sang Hyang Candra Ditya, yang menerangi',
VIIa. 4. 'ketiga dunia, demikian lamanya penderitaan manusia yang tidak berwujud',
VIIa. 5. 'manusia, jika melanggar ketentuan Sang Hyang Tamba...' (Suarbhawa et al. 2013, 31).

Kutipan prasasti di atas menunjukkan bahwa *sapatha* merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagi pelanggarnya, sehingga hal ini dapat digunakan oleh raja untuk mengendalikan

berbagai macam permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat. Secara tersurat tampak *sapatha* tersebut di atas menunjukkan suatu yang wajar, sehingga masyarakat akan menerima begitu saja dengan ikhlas tentang apa yang termuat dalam *sapatha*, akan tetapi jika dicermati secara mendalam akan tampak beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Kewajaran yang dimaksudkan adalah sesuatu peraturan yang dikeluarkan oleh raja, tentu termuat suatu hukuman jika dilanggar dan tidak tampak kepentingan penguasa atau raja di dalamnya. Kepentingan-kepentingan lain yang termuat dalam *sapatha* akan diketahui jika dibahas menyeluruh secara substansial, dengan demikian akan diketahui makna lainnya.

Makna tidak terbatas pada arti dari teks atau kalimat-kalimat bersifat tunggal, melainkan hasil relasi interteks yang lebih menekankan hubungan antara teks satu dengan teks lainnya sehingga menghasilkan makna jamak, tergantung dari yang menafsirkan. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Derrida yang mengatakan makna tidak bisa dipatok mati namun senantiasa dilengkapi oleh kata-kata lain yang terkait teks dan konteks (Derrida dalam Barker 2014, 167-169). Kedua pandangan tersebut jika dikaitkan dengan *sapatha* dalam prasasti Sukawana, maka akan ditemukan beberapa makna yang sangat berkaitan dengan kekuasaan, religi, dan hukum. Selanjutnya akan dipaparkan makna-makna yang terkandung dalam *sapatha* berdasarkan kutipan isi prasasti di atas.

Makna Kekuasaan

Sapatha tidak lepas dari kekuasaan karena dikeluarkan oleh raja yang dituangkan dalam prasasti. Kekuasaan adalah alat untuk mempengaruhi tingkah laku orang, sehingga sesuai dengan keinginan orang yang berkuasa (Budiarjo 1991, 9). Pendapat ini mengindikasikan bahwa orang yang berkuasa dapat memberikan pengaruh kepada orang lain dengan cara-cara tertentu, seperti melakukan ancaman dan membuat keputusan yang bersifat

mengikat dengan sanksi yang memberatkan (Budiarjo 1991, 17-18). Pada masa Bali Kuno kedudukan raja sangat tinggi dan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Hal ini menyebabkan raja sangat diagungkan dan diperlakukan seperti dewa atau titisan dewa. Dengan demikian, raja memiliki otoritas untuk mengatur wilayah kekuasaannya (Ardika et al. 2013, 132-137).

Sapatha merupakan suatu ide atau gagasan raja dan para pejabat kerajaan. Dari gagasan inilah nantinya tercermin suatu kesepakatan yang pada akhirnya dituangkan dalam prasasti. Ide akan menelorkan suatu ideologi yang dijadikan dasar untuk mengendalikan kekuasaan oleh raja. Ideologi menurut Barker dapat dipahami sebagai ide-ide yang mengikat dan menjadi dasar pembenaran dari semua kelompok sosial (Barker 2014, 139). Ide dominan umumnya dikeluarkan oleh kelompok masyarakat yang berkuasa (Marx dalam Barker 2014, 137). Dari kedua pendapat tersebut *sapatha* dalam Prasasti Sukawana muncul dari kelompok yang berkuasa untuk kepentingan mengubah perilaku sosial masyarakatnya. Raja sebagai pihak berkuasa berusaha mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengikat demi ketertiban hidup masyarakat, karena belum adanya dasar hukum bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Dalam hal demikian, maka *sapatha* cenderung sebagai aturan-aturan yang harus ditaati, sehingga tercipta keamanan di wilayah pemerintahan raja. *Sapatha* dalam hal ini lebih bersifat hegemoni oleh pihak yang berkuasa kepada rakyatnya.

Hegemoni merupakan cara-cara yang dilakukan kelas dominan atau kelas yang berkuasa menancapkan pengaruh yang tak terlihat namun dapat menggiring, mempengaruhi dan membuat kelas tertentu mengikuti kemauan dari sang pemilik atau pemegang hegemoni tersebut secara sadar ataupun tidak (Gramsci dalam Lubis 2015, 141). Berkaitan dengan konsep tersebut, dalam *sapatha* yang terdapat dalam Prasasti Sukawana tampak raja

sebagai pihak yang berkuasa telah melakukan hegemoni kepada masyarakatnya. Hegemoni di sini lebih bersifat halus, bahkan cenderung seruan dari raja tanpa adanya paksaan, seperti kutipan berikut: “...*na yawat umarukta sarasa nikang prasasti anugraha paduka haji i rikanang karaman i cintamani sapasuk thani at upadrawa bhatara, salwiring jagat upadrawa bhuktinya...*” (Suarbhawa et al. 2013, 7), yang berarti ‘...apabila ada orang yang berani merusak atau menentang isi prasasti anugerah paduka raja kepada penduduk Cintamani sewilayah desa, dikutuklah oleh *bhatara*, berbagai macam kutukan yang berat...’.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa raja melakukan hegemoni atas nama *bhatara* atau dewa, dengan mengatasnamakan dewa, masyarakat tidak akan berani melakukan pelanggaran. Secara tidak disadari oleh masyarakat, pikirannya sudah dipengaruhi dan digiring oleh raja dengan kepercayaan yang dianutnya saat itu. Masyarakat tidak akan melakukan perlawanan, karena hal ini mereka anggap suatu kewajiban dalam kepercayaannya. Jikalau dicermati, permohonan raja kepada dewa lebih bersifat politis, dalam artian kelas yang berkuasa telah melakukan otoritas sosial dalam kepemimpinannya terhadap kelas-kelas yang berada di bawahnya untuk kepentingan tertentu, seperti keamanan dan stabilitas kerajaan (Gramsci dalam Barker 2014, 119). Pengambilan keputusan oleh raja disaksikan dan disahkan oleh para pejabat istana. Hal ini dapat dilihat seperti kutipan berikut: “...*sinaksyaken di tanda rakryan ri pakirakiran i jro makabehan...*” (Suarbhawa et al. 2013, 7), yang berarti ‘...disaksikan oleh para pejabat dalam majelis permusyawaratan...’.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa para pejabat yang merupakan bawahan dan para pembantu raja telah menyaksikan semua keputusan yang dituangkan dalam *sapatha*. Dengan adanya saksi-saksi dalam keluarnya suatu keputusan, menunjukkan legitimasi yang harus ditaati bersama, baik masyarakat maupun

pejabat kerajaan. Para pejabat kerajaan ini juga termasuk pihak yang bertanggungjawab dan berhak melaporkan semua tindakan pelanggaran yang terjadi. Hubungan kerja antar perangkat kerajaan menunjukkan raja selalu berkoordinasi dengan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Sebelum keputusan diambil raja terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada para bawahannya seperti, *senapati*, *samgat*, dan pemuka agama (Astra 1997, 343). Dengan demikian segala keputusan yang dikeluarkan oleh raja akan mendapat legitimasi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Foucault yang menyebutkan kekuasaan memang dikendalikan oleh wacana dan bagaimana wacana itu selalu berakar dalam kekuasaan dan kekuasaan bersumber dari pengetahuan yang secara langsung saling mempengaruhi (Foucault dalam Lubis 2014, 83). *Sapatha* dalam prasasti Sukawana merupakan produk kekuasaan yang bersumber dari wacana dan pengetahuan seorang raja. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, raja mengeluarkan keputusan-keputusan untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk perlindungan rakyat, legitimasi, dan kekuasaan.

Makna Religi

Religi merupakan sistem kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhan atau alam semesta yang telah memberikan kehidupan di dunia. Tindakan manusia dalam melakukan kepercayaannya terhadap Tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang, dan makhluk halus lainnya adalah bagian dari sistem ritus dan upacara (Ardika et al. 2013, 219). Manusia masa lalu menganggap alam semesta memiliki kekuatan melebihi kekuatan manusia atau *adi kodrati* (Koentjaraningrat 1977, 62). Kepercayaan tersebut dapat diketahui dari penyebutan nama-nama dewa yang mengindikasikan bagaimana kuatnya kepercayaan tersebut. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila kepercayaan tersebut disisipkan dalam *sapatha*, seperti yang terdapat dalam kutipan prasasti Sukawana AII berikut.

“*IVa. 1. ...i bhaṭāra puntahyang, indah ta kita kamung hyang para dewatā, hyang nga*

IVa. 2. gasti mahārsi, pūrbwa satya, dakṣiṇa dharma paṇḍita kālā, uttāra mērtiyu, agneya krodha, neriti kāmā, wayabya īswara, aiśanya harih, yajamanākāśa dharma...” (Suarbhawa et al. 2013, 7).

Terjemahan dari kutipan prasasti tersebut adalah:

IVa. 1. ‘...wahai yang mulia para leluhur, para dewata Hyang’,

IVa. 2. ‘Maharesi Agasti (Agastya), di timur Satya, di selatan Dharma, di barat Kala, di utara Mertiyu, di tenggara Kroda, barat daya Kama, barat laut Iswara, timur laut Harih, yajamanakasa Dharma...’.

Kutipan di atas mencerminkan keyakinan masyarakat masa lalu terhadap religi yang berkembang saat itu. Penyebutan nama-nama dewa, seperti Hyang Agasti (Agastya), Satya, Dharma, Kama, dan Iswara dianggap mampu memperkuat *sapatha* sehingga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat. Dewa-dewa yang disebutkan dianggap sebagai saksi dan pemberi hukuman kepada siapa yang melanggar, memberikan gambaran mengenai kehidupan religi pada masyarakat pendukungnya. Adanya sebutan permohonan atau kesaksian terhadap leluhur dan nama dewa-dewa Hindu yang masih dikenal sekarang merupakan bentuk keyakinan masyarakat dalam kehidupan rohaninya (Yogaswara 2005, 57).

Religi dianggap sebagai sistem simbol yang berfungsi untuk menanamkan semangat dan motivasi yang kuat, mendalam, dan bertahan lama pada manusia dengan menciptakan konsepsi-konsepsi yang bersifat umum tentang eksistensi dan membungkus konsepsi tersebut dalam suasana faktualitas sehingga kelihatan sangat realistis (Geertz dalam Suantika 2015, 117). Simbol yang dimaksud dalam hal ini adalah dewa-dewa sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat karena premis dasar dari setiap religi adalah kepercayaan akan

adanya jiwa, sesuatu yang memiliki kekuatan dan bersifat supernatural (Thomas 1979, 359).

Selain sebagai suatu keyakinan, religi tampaknya dapat dijadikan alat oleh penguasa untuk melakukan pengendalian sosial. Penguasa memanfaatkan keyakinan masyarakat masa lalu yang sebagian besar percaya terhadap hal-hal yang bersifat mistik, kondisi ini mempunyai peranan yang sangat penting dan erat kaitannya dengan kepercayaan, sehingga masyarakat tidak akan berani melakukan pelanggaran (Ardika et al. 2013, 226). Dalam hal ini para penguasa/raja pada masa lalu menggunakan sistem keyakinan ini untuk kepentingan tertentu, misalnya dalam *sapatha* raja sengaja mencantumkan nama-nama dewa yang memang diyakini oleh masyarakat. Hal ini akan menimbulkan beberapa tafsir yang kemungkinan salah satunya adalah untuk melindungi kekuasaan sang raja. Kalau dilihat dari permohonan kepada semua dewa yang terdapat di dalam *sapatha* bukan tidak mungkin rajalah yang bertindak sebagai dewa, karena konsep dewa raja yang sangat diyakini oleh masyarakat pada masa lalu, seperti yang dikatakan oleh Ardika et al. (2013, 132-137) bahwa raja merupakan *dewa sekala* atau titisan dewa di dunia. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan rajalah yang melakukan dan mengeksekusi hukuman pada saat itu. Selain bertindak sebagai pemegang pemerintahan tertinggi, raja juga berhak memutuskan semua permasalahan termasuk memberikan hukuman kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini raja bukan saja sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan, bahkan mempunyai kewenangan yang besar dalam bidang kehakiman (Astra 1997, 26).

Makna hukum

Sapatha pada prasasti merupakan bagian dari sistem hukum karena di dalamnya berisi sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan berperan untuk menjaga keteraturan dan keamanan di wilayah setempat (Yogaswara 2005, 48). Hukum merupakan

seperangkat sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib. Hukum memiliki perintah dan larangan yang harus ditaati sehingga implementasinya menimbulkan rasa aman bagi masyarakat (Apeldoorn dalam Yogaswara 2005, 47). Hukum memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat dan hal ini dapat menentukan batas-batas hak dan kewajiban dalam berinteraksi (Yogaswara 2005, 47). Dengan demikian, hukum memiliki peran sentral dalam kehidupan bernegara. *Sapatha* sebagai salah satu bagian dalam prasasti di dalamnya juga termuat produk-produk hukum yang sengaja disisipkan oleh raja sebagai bagian untuk pengendalian masyarakat. *Sapatha* dalam prasasti dapat memberikan jaminan kepada institusi politik dan agama karena kontrol sosial yang masih sangat lemah, sehingga *sapatha* dianggap mampu meminimalisir pelanggaran (Maulana 1993, 127).

Sanksi atau hukuman yang terdapat dalam *sapatha* lebih bersifat kepada sanksi moral dan lebih cenderung bersifat *niskala* atau kepercayaan, baik pada saat manusia masih hidup maupun sudah meninggal. Beberapa sanksi yang dapat dilihat dalam *sapatha* adalah sebagai berikut.

“IVb. 3. ...na yawat umarukta sarasa nikang prasasti anugraha paduka haji i rikanang karaman i cintamani sapasuk thani at upadrawa bhatarā, salwiring jagat upadrawa bhuktinya

IVb. 4. saputning phira, sajiwakala atēher kapataka hitipan ing tamra gomuka ping satahasra dasa manu ta lawasanyan pangjanma, taktak, wdit hulr, latay, lintah,...” (Suarbhawa et al. 2013, 7).

Terjemahan dari kutipan prasasti tersebut adalah:

IVb. 3. ‘...apabila ada orang yang berani merusak atau menentang isi prasasti anugerah paduka raja kepada penduduk Cintamani sewilayah desa, dikutuklah oleh *bhatarā*, berbagai macam kutukan yang berat’,

IVb. 4. 'ia dapatkan selama hidupnya, jika sudah mati disiksa di dasar kawah Candra Gomuka sampai 10 ribu tahun, dan jika dia menjelma ke dunia maka akan menjadi tak-tak, wdit, ulat, dan lintah...?.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar lebih bersifat *niskala* atau seruan sesuai dengan kepercayaan yang dianut masyarakat pada saat itu, selain mencantumkan hukuman yang bersifat fisik berupa denda atau sejenisnya. Segala jenis sanksi tersebut dianggap sudah mampu untuk membuat masyarakat taat. Hukum sebagai suatu batasan dalam pergaulan masyarakat sengaja diciptakan oleh pihak yang berkuasa dengan harapan mampu memberikan efek jera dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sanksi atau hukuman selain sebagai pemberi sanksi, juga sebagai sebuah perlindungan terhadap kekuasaan, karena dengan adanya hukum raja dapat mengendalikan sistem pemerintahan dengan berpegang pada produk hukum yang telah disepakati. Dalam artian keluarnya produk hukum ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan penguasa yang telah disepakati dan dicantumkan dalam *sapatha*.

KESIMPULAN

Sapatha dalam prasasti sukawana AII dan Sukawana D menunjukkan bagaimana eksistensi seorang penguasa yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat mengikat. Kesepakatan ini dapat diketahui dari beberapa makna yang terkandung dalam *sapatha* seperti makna kekuasaan yang menunjukkan bagaimana pihak yang berkuasa melakukan dominasi terhadap keputusan yang dikeluarkan kemudian disahkan dalam persidangan istana. Makna religi menunjukkan tentang penguasa menggunakan sistem kepercayaan untuk menghegemoni masyarakat sehingga disegani oleh masyarakat. Makna hukum dapat memberikan jaminan kontrol sosial meskipun hanya bersifat hukum *niskala* atau seruan.

Ketiga makna tersebut menunjukkan hubungan yang sangat erat terkait dengan dominasi kelas berkuasa terhadap masyarakat ada saat itu. *Sapatha* sebagai bagian dari prasasti tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan seperti pengendalian sosial, eksistensi kekuasaan, dan kesepakatan bersama yang cenderung untuk keamanan bersama. Dengan demikian, *sapatha* dapat dijadikan pedoman dalam keluarnya suatu kebijakan oleh pemerintah saat ini, khususnya dalam hal pengendalian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan, I Gde Parimartha, dan A.A. Bagus Wirawan. 2013. *Sejarah Bali dari Prasejarah Hingga Modern*. Denpasar: Udayana Press.
- Astawa, A.A. Gede Oka. 1996. "Stratifikasi Kekuasaan Pada Masa Pemerintahan Raja Marakata di Bali Abad Ke-11 Masehi." *Forum Arkeologi*, no. 1: 28-35.
- Astra, I Gde Semadi. 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII: Sebuah Kajian Epigrafis." Disertasi, Program Studi Arkeologi, Universitas Gadjah Mada.
- Atmodjo, Sukarto K. 1977. "Penelitian Epigrafi Bali Tahap I." *Berita Penelitian Arkeologi* (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional).
- Bakker, J.W.M. 1972. *Ilmu Prasasti Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Budaya IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.
- Barker, Chris. 2014. *Kamus Kajian Budaya*. Edisi Terjemahan. Diterjemahkan oleh B. Hendar Putranto. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Boechari. 1977. "Epigrafi dan Sejarah Indonesia." *Majalah Arkeologi* 1 (2): 1-40.
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Darmosoetopo, Riboet. 1995. "Dampak Kutukan dan Denda Terhadap Penetapan Sima pada Masyarakat Jawa Kuna." Dalam *Analisis Hasil Penelitian Arkeologi: Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik*, disunting oleh Endang Sri Hardiati, 17-22. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Koentjaraningrat. 1977. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- _____. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maulana, Ratnaesih. 1993. *Siwa dalam Berbagai Wujud: Suatu Analisis Ikonografi di Jawa Masa Hindu-Buddha*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Muzir, Inyik Ridwan. 2008. *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suantika, I Wayan. 2015. "Tinggalan Arkeologi di Pura Puseh Kiadan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung: Kajian Bentuk dan Fungsi." *Forum Arkeologi* 28 (2): 115-130.
- Suarbhawa, I Gusti Made, I Nyoman Sunarya, I Wayan Sumerata, dan Luh Suwita Utami. 2013. "Prasasti Sukawana." *Berita Penelitian Arkeologi* (Balai Arkeologi Denpasar).
- Sunarya, I Nyoman, I Gusti Made Suarbhawa, dan I Wayan Sumerata. 2015. "Penelitian Prasasti Kintamani." *Berita Penelitian Arkeologi* (Balai Arkeologi Denpasar).
- Thomas, David Hurst. 1979. *Archaeology*. New York: Rinehart & Winston.
- Wirtawan, I Wayan. 2013. "Unsur-Unsur Birokrasi Pada Masa Bali Kuno: Kajian Berdasarkan Data Prasasti Sukawana D." Skripsi, Program Studi Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Yogaswara, Wawan. 2005. "Sapatha dalam Prasasti Sima dari Masa Majapahit: Tinjauan Tentang Fungsi." Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Arkeologi, Universitas Indonesia.
- Zoetmulder. 1995. *Kamus Jawa Kuna-Indonesia, Jilid I dan Jilid II*. Diterjemahkan oleh Darusuprpta dan Sumarti Suprayitna. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.